

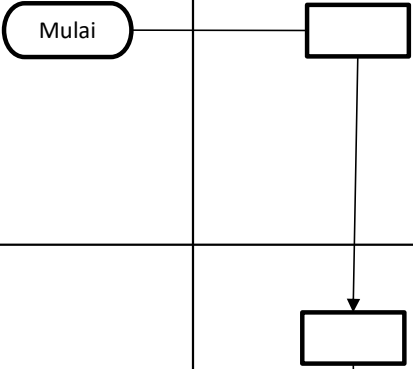
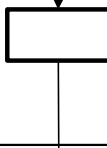
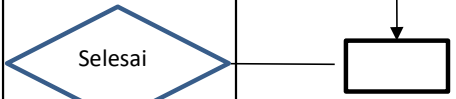


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor SOP	MORA.14.03.04.SOP 04
Tanggal pembuatan	01 Desember 2025
Tanggal revisi	03 Januari 2026
Tanggal efektif	
Disahkan oleh	Kepala Bagian Tata Usaha  H. Edison, M.Ag NIP. 197603051997031003
Judul SOP	Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP no. 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Kementerian Agama. 4. KMA nomor 92 tahun 2019 tentang pedoman layanan informasi publik bagi PPID kementerian agama dan atasan PPID Kementerian agama 5. KMA nomor 461 tahun 2020 tentang PPID kementerian agama dan atasan PPID kementerian agama	1. Minimal sarjana Sederajat 2. Memahami undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 3. memiliki kemampuan memahami pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi 4. mempunyai kemampuan dan pengetahuan pengolahan data menggunakan microsoft excel
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Permintaan Informasi Publik 2. SOP Pengumuman Informasi Publik 3. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik 4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term Of Reference 3. Alat Tulis Kantor, Komputer 4. Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, apabila SOP ini tidak berjalan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh instansi	disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

SOP Maklumat Pelayan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Badan Publik/ PPID pelaksana wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggaraan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik					Rancangan Maklumat Pelayanan informasi publik	
2	Atasan PPID Menelaah dan menetapkan maklumat pelayanan informasi publik agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya			Rancangan Maklumat Pelayan Informasi Publik		Maklumat pelayanan informasi publik	
3	Badab publik /PPID pelaksaa wajib mengumumkan dan menyebarkan maklumat pelayanan melalui papan pengumuman , laman resmi website PPID/Badan Publik, media sosial teknologi informasi serta wajib berbasis teknologi informasi dan memperhatikan akses bagi penyandang disabilitas			Maklumat Pelayan Informasi Publik	Setiap hari dan jam kerja	Maklumat pelayanan informasi publik dapat di akses masyarakat	